

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN BELANJA MODAL TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

Febryna Burkan
febryna1991a@gmail.com
 Universitas Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022. Data yang digunakan dalam kajian empiris ini merupakan data sekunder dengan jenis data time series 2018-2022 dan crosssection 11 Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten / kota di Provinsi Jambi sedangkan Dau dan Dak secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: PAD, DAU, DAK, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah tolak ukur kesejahteraan dan kemakmuran rakyat suatu Negara. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan Negara tersebut semakin maju dan berkembang. Konteks pembangunan nasional merupakan salah satu aspek yang masuk dalam teori makro ekonomi. Tinggi rendah angka pembangunan dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi tiap tahun. Pertumbuhan ekonomi meliputi segenap aktivitas produksi barang dan jasa dalam periode tertentu dan menentukan angka pendapatan nasional suatu Negara serta kesejahteraan masyarakatnya. Priambodo, A. (2014)

Syafrizal (2015) menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Mengingat potensi masing- masing daerah bervariasi maka sebaiknya masing- masing daerah harus menentukan kegiatan sector dominan (unggulan).

Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah tidak terlepas dari peranan masing- masing sektor yang ada. Semakin besar kontribusi masing- masing sektor maka semakin cepat pertumbuhan yang ada.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 – 2022 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (dalam persen)

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota (dalam persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata- rata
Kerinci	4,93	4,23	3,86	4,16	4,43	4,32
Merangin	5,39	4,93	0,83	5,09	5,72	4,5
Sarolangun	4,68	4,80	-0,25	6,61	6,73	4,51
Batanghari	4,81	4,83	-0,39	4,74	12,27	5,25
Muaro Jambi	4,95	5,01	0,37	4,08	7,97	4,47
Tanjung Jabung Timur	3,07	2,94	-3,92	0,13	0,57	0,56
Tanjung Jabung Barat	4,48	6,77	-0,6	1,36	2,56	2,91
Tebo	5,58	4,98	0,02	4,32	6,3	4,24

Bungo	5,68	4,65	0,44	5,12	4,73	4,11
Kota Jambi	4,68	5,30	-3,96	3,94	5,36	3,06
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	-0,16	3,67	4,45	3,77
Provinsi Jambi	7,85	7,51	7,97	8,09	7,62	7,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2023

Dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan secara berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Tanjung Timur yang mengalami peningkatan secara bervariasi dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan rata-rata periode 2018-2022 sebesar 0,56 persen, sedangkan pertumbuhan tertinggi di periode yang sama terjadi di Provinsi Jambi dengan rata-rata sebesar 7.81 persen.

Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang paling rendah akan berdampak pada lemahnya peningkatan pendapatan masyarakat. Maka dari itu perlu upaya memaksimalkan potensi daerah dan memaksimalkan potensi daerah dan memaksimalkan tumbuh kembangnya perekonomian di wilayah bersangkutan untuk meminimalisir ketimpangan antar daerah serta mencapai kualitas pelayanan publik yang maksimal (Andirfa, 2009) Pertumbuhan ekonomi ditanjung jabung timur yang masih rendah dikarenakan masih banyaknya penduduk yang bekerja dibidang pertanian. Maka dari itu perlu upaya memaksimalkan potensi daerah dan memaksimalkan tumbuh kembangnya perekonomian di wilayah bersangkutan untuk meminimalisir ketimpangan antar daerah. Serta mencapai kualitas pelayanan public yang maksimal (Andirfa, 2009).

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalan sumber-sumber dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Karena kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Perananan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah. yaitu kurang dari 20 persen hingga 50 persen. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan belanja modal kurang dari 20 persen.

Pendapatan Asli Dearah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2006). Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan di bidang industry dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar disbanding daerah lainnya. Begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. disatu sisi ada daerah yang tertinggal Karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah. Namun sangat tergantung pembiayaannya melalui dana aliookasi umum yang diberikan pemerintah pusat.

Kecilnya PAD di kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pendapatan daerah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten tersebut belum maksimal dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki daerahnya. Namun pada realita menunjukkan tidak semua daerah mampu untuk lepas dari pemerintah pusat. Dikarenakan tingkat kebutuhan tiap daerah berbeda. Maka dalam kenyataannya pemerintah pusat tidak dapat lepas tangan begitu saja terhadap kebijakan otonominya.

Hal ini tidak hanya terlihat dalam konteks kerangka hubungan politis dan wewenang daerah. namun juga terlihat dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah Simanjuntak, S. (2004) mengenai proporsi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal di Provinsi Jambi tahun 2018-2022, peningkatan PAD Sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal di Provinsi Jambi kecendrungan masih rendah.

Tabel 2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	80,48	85,90	81,67	66,89	36,71
2	Merangin	89,30	106,16	100,32	107,88	105,43
3	Sarolangun	118,83	94,62	70,10	63,59	62,62
4	Batanghari	98,81	91,57	104,23	148,44	107,14
5	Muaro Jambi	90,31	93,79	92,80	110,75	108,27
6	Tanjung Jabung Timur	49,61	53,92	49,65	81,60	52,84
7	Tanjung Jabung Barat	101,84	120,22	115,56	118,53	130,48
8	Tebo	76,16	83,24	78,46	92,92	79,14
9	Bungo	133,85	140,33	126,13	198,75	130,12
10	Kota Jambi	338,89	393,43	355,67	384,73	436,89
11	Kota Sungai Penuh	34,18	34,90	29,05	59,11	66,15

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Kemandirian keuangan daerah di era otonomi daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting diantaranya oleh pertumbuhan ekonomi daerah serta Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Kehidupan perekonomian yang mengalami peningkatan setiap tahunnya akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif.

Kondisi ini akan memacu peningkatan pendapatan masyarakat, Peningkatan pendapatan akan mendorong kesadaran masyarakat untuk makin giat membayar pajak dan retribusi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya PAD di suatu daerah akan menciptakan kemandirian keuangan daerah yang semakin baik setiap tahunnya. Pemberian Otonomi Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada

pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya.

Berdasarkan table 2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 PAD Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi PAD tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 436,89 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2018 di Kota Sungai Penuh sebesar 34,18 M.

Tabel 3. Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)

Wilayah	DAU					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	589,20	613,63	567,86	557,77	557,77	577,24
Merangin	718,85	742,33	666,86	658,73	658,89	689,13
Sarolangun	529,50	600,49	536,90	529,16	529,50	545,11
Batanghari	605,74	632,05	569,63	559,82	560,13	585,47
Muaro Jambi	670,34	700,82	629,16	619,50	620,13	647,99
Tanjung Jabung Timur	540,40	565,64	521,92	514,77	514,99	531,54
Tanjung Jabung Barat	506,59	537,18	487,55	479,38	479,79	498,09
Tebo	582,31	599,22	534,45	528,39	528,68	542,41
Bungo	636,00	657,96	600,09	589,40	589,40	614,57
Kota Jambi	714,78	759,71	687,48	675,29	675,29	702,51
Kota Sungai Penuh	422,53	452,46	412,57	405,07	405,07	419,54

Sumber : (<http://www.dpk.depkeu.go.id> 2023)

Berdasarkan table 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 DAU Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi DAU tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 759,71 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2021 di Kota Sungai Penuh sebesar 405,07 M.

Tabel 4. Realisasi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)

Wilayah	DAK					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	54,00	77,52	48,91	67,87	41,05	57,87
Merangin	83,87	118,77	111,06	98,62	49,74	92,412
Sarolangun	75,56	126,79	82,42	75,00	75,56	87,06
Batanghari	50,44	73,44	85,20	111,89	95,09	83,21
Muaro Jambi	61,59	67,91	52,78	79,63	71,19	66,62
Tanjung Jabung Timur	114,87	101,11	81,05	109,10	114,06	104,03
Tanjung Jabung Barat	55,79	80,32	87,65	72,43	67,39	72,71
Tebo	43,12	71,86	54,71	109,64	119,66	79,69

Bungo	98,66	106,31	84,98	49,13	51,01	78,01
Kota Jambi	148,63	105,45	125,21	103,11	52,52	87,84
Kota Sungai Penuh	44,06	58,84	49,13	42,86	39,46	46,87

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

Berdasarkan table 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 DAK Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi DAK tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 148,63 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2021 di Kota Sungai Penuh sebesar 39.46 Milyar.

Tabel 5. Realisasi Belanja Modal Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)

Wilayah	Belanja Modal					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	191,87	293,81	216,76	165,03	158,55	205,20
Merangin	207,24	226,73	274,68	342,89	73,71	175,65
Sarolangun	215,17	414,97	247,73	158,70	184,69	244,25
Batanghari	148,21	251,15	150,46	177,30	276,39	200,70
Muaro Jambi	292,73	322,19	262,78	268,24	246,15	278,41
Tanjung Jabung Timur	312,96	328,87	229,23	229,95	290,56	278,31
Tanjung Jabung Barat	419,66	697,23	353,97	404,37	474,29	469,90
Tebo	258,99	269,09	139,86	222,21	387,53	255,53
Bungo	203,21	234,63	153,99	103,30	115,34	162,09
Kota Jambi	445,81	432,10	444,35	495,81	368,63	437,34
Kota Sungai Penuh	194,68	176,54	134,64	168,82	140,13	162,96

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

Berdasarkan table 5 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 Belanja Modal Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi Belanja Modal tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 495,81 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2022 di Kabupaten Merangin sebesar 73,71 Milyar.

Peningkatan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal menunjukkan pemerintah daerah belum dapat menjalani otonomi daerah sepenuhnya dan masih tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Bila dibandingkan dengan PAD yang walaupun mengalami peningkatan sangat kecil dibandingkan dengan peningkatan pada Dana Alokasi oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten/Kota sebagai dana bantuan (grant). Tingginya tingkat ketergantungan belanja modal terhadap pendanaan dana alokasi umum, itu menunjukkan tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat. Optimalnya dan alokasi umum yang diperoleh daerah dialokasikan untuk belanja modal yang kemudian akan meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah. Realita menunjukkan hal yang sebaliknya. Daerah cenderung mengabaikan penggalan sumber- sumber PAD sebagai basis utama penerimaan daerah menjadikan dana perimbangan berupa dana alokasi umum sebagai substitusinya (Maimunah, 2015)

Penyebab permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum

dijadikan instrument horizontal imbalance untuk pemerataan atau mengisi fiscal gap. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan yang timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Disisi lain Alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bias dilakukan karena dasar perhitungan fiscal needs tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-masing daerah. dan system penganggaran yang belum berdasarkan pada analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Tingkat kemandirian daerah belum memperlihatkan kemajuan yang berarti bahkan cenderung menurun. Pemerintah daerah justru semakin menggantungkan diri pada DAU, DAK bahkan Belanja Modal daripada mengupayakan peningkatan penerimaan asli daerah (PAD). Hal ini memperlihatkan indikasi kurang seriusnya daerah dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Dengan lebih mengandalkan penerimaan DAU yang bersifat hibah. Sebagai pertimbangan praktis upaya ini lebih dipilih dari pada meningkatkan PAD secara signifikan. Sehingga sebagai konsekuensinya PAD yang diterima menjadi lebih kecil sehingga pemerintah daerah sulit untuk mengalokasikan dana ke berbagai bentuk pengeluaran pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

Beranjak dari permasalahan diatas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana pola perubahan alokasi yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Hal inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilih Provinsi Jambi sebagai objek penelitian yang berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data *time series* 2018-2022 dan crossection 11 Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Kabupaten/kota di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

1. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu dasar yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan dan menyusun kebijakan dalam pembangunan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan atau laju pertumbuhan ekonomi adalah dengan melihat perkembangan PDRB. pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang merata dan berkesinambungan (equity sustainable growth). Ini berarti tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan suatu negara dengan pemanfaatan modal yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin tercapainya tujuan diatas. Adanya trade off antara pertumbuhan dan pemerataan mengakibatkan kelambanan pendapatan perkapita suatu bangsa. Disisi lain pembangunan yang berdasarkan konsep trickle down effect mengakibatkan program yang berorientasi pada pemerataan terabaikan walaupun laju pertumbuhan ekonomi tinggi.

Pertumbuhan ekonomi dimasing- masing kabupaten/kota periode tahun 2018-2022

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Periode Tahun 2018-2022 (dalam Persen)

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/ Kota (dalam persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata- rata
Kerinci	4,93	4,23	3,86	4,16	4,43	4,32
Merangin	5,39	4,93	0,83	5,09	5,72	4,50
Sarolangun	4,68	4,80	-0,25	6,61	6,73	4,51
Batanghari	4,81	4,83	-0,39	4,74	12,27	5,25
Muaro Jambi	4,95	5,01	0,37	4,08	7,97	4,47
Tanjung Jabung Timur	3,07	2,94	-3,92	0,13	0,57	0,56
Tanjung Jabung Barat	4,48	6,77	-0,6	1,36	2,56	2,91
Tebo	5,58	4,98	0,02	4,32	6,3	4,24
Bungo	5,68	4,65	0,44	5,12	4,73	4,11
Kota Jambi	4,68	5,30	-3,96	3,94	5,36	3,06
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	-0,16	3,67	4,45	3,77
Provinsi Jambi	7,85	7,51	7,97	8,09	7,62	7,81

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi 2022

Dari tabel laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten/Kota Jambi selama tahun 2018-2022 terjadi secara signifikan dimana rata-rata laju pertumbuhan PDRB ADHK Provinsi Jambi sebesar 7,81 persen dimana laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu mencapai angkatan 8,09 persen dengan angka terendah sebesar 7,51 persen terjadi pada tahun 2019 meningkatnya angka PDRB tersebut dikarenakan meningkat juga sector ekonomi yang mulanya hanya Sembilan (9) sector menjadi tujuh belas (17) yang memungkinkan setiap sector memberikan masing- masing kontribusi terhadap peningkatan PDRB.

Sedangkan laju pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2022 juga terjadi secara fluktuatif dimana rata-rata Kabupaten/Kota memberikan laju pertumbuhan PDRB yang meningkat tiap tahunnya. Rata- rata pertumbuhan terendah terjadi di kabupaten tanjung jabung timur sebesar 0,56 persen yaitu pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -3,92. Selanjutnya pertumbuhan terendah kedua terjadi di kabupaten Tanjung jabung barat yaitu sebesar 2,91 persen yaitu pertumbuhan terendah terjadi ditahun 2020 -0,6 persen. rata- rata pertumbuhan ekonomi rendah tersebut dikarenakan adanya covid yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Jika PDRB meningkat juga akan menindikasikan pendapatan perkapita lebih besar pula. Akan tetapi apabila sebaliknya jika pertumbuhan PDRB menurun maka akan berdampak bagi masyarakat terutama pendapatan yang diperoleh rata- rata masyarakat. Sector yang paling utama penyumbang PDRB Provinsi Jambi masih didominasi oleh sector pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 32,60 persen terhadap PDRB. Sedangkan laju pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi pada periode tahun 2018-2022 juga terjadi secara fluktuatif dimana rata-rata Kabupaten/Kota memberikan laju pertumbuhan PDRB yang meningkat tiap tahunnya.

2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Optimalisasi dalam penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan public. Eksploitasi PAD ynag berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat menjadi disentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap digunakan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dicerminkan dari besaran penerimaan PAD yang merupakan komponen anggaran daerah sebagai pencapaian penghimpunan potensi ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan dan pembiayaan bagi pembangunan. Penerimaannya diupayakan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan PAD suatu daerah diharapkan akan memberi pengaruh positif terhadap perekonomian suatu daerah dan sekaligus langkah untuk mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintahan yang lebih tinggi.

PAD yang besar yang berhasil dihimpun suatu daerah akan mendorong tersedianya dana serta menjamin pembangunan tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Peningkatan penerimaan PAD dapat diupayakan melalui peningkatan sumber- sumber penerimaan PAD itu sendiri yang melalui pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan BUMD dan lain- lain PAD yang sah.

Seiring dengan meningkatnya PAD, diharapkan tingkat kemandirian pemerintah daerah semakin meningkat. Tingkat kemandirian ini ditunjukkan dengan kontribusi PAD (share) untuk mendanai belanja- belanja daerahnya. (Sidik,2002). Berkaitan dengan hal ini, Bappenas (2003) menyatakan bahwa dalam era otonomi seharusnya peran PAD semakin besar dalam membiayai berbagai belanja daerah. Seiring dengan peningkatan (pertumbuhan) meningkatnya pemberian pelayanan publik, diharapkan kontribusi masyarakat semakin meningkat pula, penerimaan PAD jadi semakin tinggi. Kontribusi pemerintah pusat semakin menurun seiring dengan meningkatnya kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD nya.

Namun demikian, pemerintah daerah harus mencegah eksploitasi yang berlebihan terhadap upaya peningkatan PAD ini. Eksploitasi pajak yang secara berlebihan justru akan menyebabkan masyarakat semakin terbebani dan menjadi disentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo,2002; Saragih,2003). Akibatnya bukan peningkatan PAD yang terjadi malah justru sebaliknya. Yang menjadi komoditas unggulan dalam sector pariwisata di Provinsi Jambi dan pertanian. Provinsi jambi saat ini merupakan salahsatu provinsi yang didominasi oleh sumber daya alam salahsatunya dari pertanian terutama perkebunan kelapa sawit Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kotadi di Provinsi Jambi selama periode tahun 2018- 2022 terus diupayakan meningkat setiap tahunnya. Perkembangan pertumbuhan PAD dapat dilihat pada table 2 berikut:

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 -2022 (dalam milyar)

No	Kabupaten/ Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
1	Kerinci	80,48	85,90	81,67	66,89	36,71	1,15
2	Merangin	89,30	106,16	100,32	107,88	105,43	0,86
3	Sarolangun	118,83	94,62	70,10	63,59	62,62	3,58
4	Batanghari	98,81	91,57	104,23	148,44	107,14	4,11
5	Muaro Jambi	90,31	93,79	92,80	110,75	108,27	1,68
6	Tanjung Jabung Timur	49,61	53,92	49,65	81,60	52,84	4,77

7	Tanjung Jabung Barat	101,84	120,22	115,56	118,53	130,48	0,64
8	Tebo	76,16	83,24	78,46	92,92	79,14	1,39
9	Bungo	133,85	140,33	126,13	198,75	130,12	3,51
10	Kota Jambi	338,89	393,43	355,67	384,73	436,89	0,65
11	Kota Sungai Penuh	34,18	34,90	29,05	59,11	66,15	10,15

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa secara umum selama periode penelitian pertumbuhan PAD setiap tahunnya tumbuh positif. Penurunan pertumbuhan PAD yang kecil terjadi di Kabupaten Merangin dan Tanjabbar yang persentase rata-rata pertumbuhan tidak mencapai 2 persen selama 5 tahun terakhir. Salah satu penyebabnya adalah adanya sumber-sumber PAD tertentu yang sebelumnya dipungut menjadi PAD tidak boleh lagi dipungut.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten/kota rata-rata setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 6%. Sampai saat ini sektor pariwisata masih menyumbang Kontribusi terbesar pada PAD. Sektor pariwisata disini hasil dari retribusi penggunaan tempat wisata dan juga ada penambahan pendapatan pada PAD yang bersumber dari penyewaan gedung atau aula untuk menambah PAD Kabupaten/ kota di Provinsi Jambi.

3. Perkembangan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi dana yang alokasi dana umum relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh dana alokasi yang relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan- kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim,2014).

Tabel 3. Perkembangan Dana Alokasi Umum Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)

Wilayah	DAU					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	589,20	613,63	567,86	557,77	557,77	577,24
Merangin	718,85	742,33	666,86	658,73	658,89	689,13
Sarolangun	529,50	600,49	536,90	529,16	529,50	545,11
Batanghari	605,74	632,05	569,63	559,82	560,13	585,47
Muaro Jambi	670,34	700,82	629,16	619,50	620,13	647,99
Tanjung Jabung Timur	540,40	565,64	521,92	514,77	514,99	531,54
Tanjung Jabung Barat	506,59	537,18	487,55	479,38	479,79	498,09
Tebo	582,31	599,22	534,45	528,39	528,68	542,41
Bungo	636,00	657,96	600,09	589,40	589,40	614,57
Kota Jambi	714,78	759,71	687,48	675,29	675,29	702,51
Kota Sungai Penuh	422,53	452,46	412,57	405,07	405,07	419,53

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023

Berdasarkan table 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 DAU Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi DAU tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 759,71 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2021 di Kota Sungai Penuh sebesar 405,07 M. dari data ini menunjukkan bahwa kota sungai penuh dengan pembelanjaan daerah yang kecil disbanding kabupaten/kota yang lain. Hal ini justru sebaliknya yang terjadi di kota jambi realisasinya belanjanya paling tinggi.

4. Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Menurut PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. DAK dapat juga disebut dana infrastruktur karena merupakan belanja modal untuk membiayai investasi pengadaan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK juga dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas. Mekanisme pengalokasian DAK yaitu:

1. Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja PNSD
2. Kriteria Khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

Kriteria Teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

Tabel 4. Perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 (dalam milyar)

Wilayah	DAK					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	54,00	77,52	48,91	67,87	41,05	57,87
Merangin	83,87	118,77	111,06	98,62	49,74	92,412
Sarolangun	75,56	126,79	82,42	75,00	75,56	87,06
Batanghari	50,44	73,44	85,20	111,89	95,09	83,21
Muaro Jambi	61,59	67,91	52,78	79,63	71,19	66,62
Tanjung Jabung Timur	114,87	101,11	81,05	109,10	114,06	104,03
Tanjung Jabung Barat	55,79	80,32	87,65	72,43	67,39	72,71
Tebo	43,12	71,86	54,71	109,64	119,66	79,69
Bungo	98,66	106,31	84,98	49,13	51,01	78,01
Kota Jambi	148,63	105,45	125,21	103,11	52,52	87,84
Kota Sungai Penuh	44,06	58,84	49,13	42,86	39,46	46,87

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023

Berdasarkan table 4 dapat dilihat bahwa pada tahun 2018-2022 DAK Provinsi Jambi berfluktuatif setiap tahunnya. Dengan Realisasi DAK tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 148,63 Milyar di Kota Jambi dan Realisasi terendah pada tahun 2021 di Kota Sungai Penuh sebesar 39,46 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi untuk belanja alokasi kriteria khusus masih kurang

5. Perkembangan Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu jenis Belanja langsung dalam APBN/APBD. Menurut Erlina dan Rasdianto (2017) belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk asset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Besaran nilai pembelian/ pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja

modal hanya sebesar harga beli/ bangun asset (Permendagri 13 tahun 2006). Dalam lampiran lain III PMK No.101/PMK.02/2017 belanja modal dipergunakan untuk antara lain : Belanja Modal Tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya dan belanja modal badan layanan umum (BLU).

Secara spesifik sumber pendanaan untuk belanja modal belum ditentukan aturannya. Namun seluruh jenis sumber- sumber penerimaan daerah dapat dialokasikan untuk mendanai Belanja daerah diantaranya Belanja Modal. Sumber- sumber penerimaan daerah yang dapat digunakan sebagai sumber pendanaan belanja daerah berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan.

Tabel 5. Perkembangan Belanja Modal Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Jambi dari tahun 2018 2022 (dalam milyar)

Wilayah	Belanja Modal (dalam milyar)					
	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
Kerinci	191,87	293,81	216,76	165,03	158,55	205,20
Merangin	207,24	226,73	274,68	342,89	73,71	175,65
Sarolangun	215,17	414,97	247,73	158,70	184,69	244,25
Batanghari	148,21	251,15	150,46	177,30	276,39	200,70
Muaro Jambi	292,73	322,19	262,78	268,24	246,15	278,41
Tanjung Jabung Timur	312,96	328,87	229,23	229,95	290,56	278,31
Tanjung Jabung Barat	419,66	697,23	353,97	404,37	474,29	469,90
Tebo	258,99	269,09	139,86	222,21	387,53	255,53
Bungo	203,21	234,63	153,99	103,30	115,34	162,09
Kota Jambi	445,81	432,10	444,35	495,81	368,63	437,34
Kota Sungai Penuh	194,68	176,54	134,64	168,82	140,13	162,96

Sumber : (<http://www.djpk.depkeu.go.id> 2023)

B. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

1. Analisis Data Panel

Analisis data panel memiliki tiga macam model yaitu : model Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect. Berdasarkan pengujian Chow dan Hausman dan berdasarkan kriteria untuk memperoleh model yang terbaik yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah model Fixed Effect Method. Pengujian model dalam regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode yaitu common effect models, fixed effect models dan random effect models. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

1) Pendekatan Model Common Effect

Pendekatan model common effect ini mengasumsikan bahwa intersep dan slope yaitu tetap sepanjang waktu dan kabupaten/kota, kemudian adanya perbedaan intersep dan slope diasumsikan akan dijelaskan oleh variabel gangguan (error atau residual). Hasil regresi model common effect dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.
Hasil Regresi Model Common Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.02232	10.12514	2.866363	0.0061
PAD	0.397379	0.113927	3.488010	0.0010
DAU	-1.622207	0.495974	-3.270750	0.0019
DAK	0.964016	0.273121	3.529635	0.0009
BM	0.382311	0.115980	3.296364	0.0018
R-squared	0.601420	Mean dependent var		30.13672
Adjusted R-squared	0.569534	S.D. dependent var		0.499679
S.E. of regression	0.327839	Akaike info criterion		0.693919
Sum squared resid	5.373914	Schwarz criterion		0.876403
Log likelihood	-14.08276	Hannan-Quinn criter.		0.764487
F-statistic	18.86136	Durbin-Watson stat		0.534687
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah Eviews 12

2) Pendekatan Model Fixed Effect

Pendekatan model fixed effect tidak memperhatikan dari dimensi waktu ataupun dimensi kabupaten/kota. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu. Hasil regresi model fixed effect dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7.
Hasil Regresi Model Fixed Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	39.09231	4.628842	8.445375	0.0000
PAD	0.004004	0.036833	0.108697	0.9140
DAU	-0.471958	0.148746	-3.172917	0.0029
DAK	0.164299	0.053024	3.098590	0.0036
BM	-0.020341	0.025202	-0.807109	0.4244
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.994772	Mean dependent var		30.13672
Adjusted R-squared	0.992942	S.D. dependent var		0.499679
S.E. of regression	0.041979	Akaike info criterion		-3.276276
Sum squared resid	0.070491	Schwarz criterion		-2.728822
Log likelihood	105.0976	Hannan-Quinn criter.		-3.064571
F-statistic	543.6248	Durbin-Watson stat		2.034810
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: data diolah Eviews 12

3) Pendekatan Model Random Effect

Pendekatan model random effect didasarkan adanya perbedaan antara intersep dan slope sebagai akibat adanya perbedaan antara kabupaten/kota. Berikut ini hasil dari regresi model random effect dalam penelitian ini:

Tabel 8.
Hasil Regresi Model Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	35.50662	4.321108	8.217017	0.0000
PAD	0.039254	0.035353	1.110356	0.2722
DAU	-0.404670	0.141620	-2.857432	0.0062
DAK	0.198535	0.051412	3.861615	0.0003
BM	-0.020889	0.024686	-0.846212	0.4015
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.268086	0.9761
Idiosyncratic random			0.041979	0.0239
Weighted Statistics				
R-squared	0.318828	Mean dependent var		2.105286
Adjusted R-squared	0.264334	S.D. dependent var		0.060240
S.E. of regression	0.051669	Sum squared resid		0.133482
F-statistic	5.850718	Durbin-Watson stat		0.995702
Prob(F-statistic)	0.000608			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.072028	Mean dependent var		30.13672
Sum squared resid	12.51153	Durbin-Watson stat		0.010623

Sumber: data diolah Eviews 12

4) Uji Kesesuaian Model

Model regresi data panel harus dilakukan pengujian untuk memilih model regresi yang tepat digunakan dalam penelitian. Pengujian model regresi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Chow Test (Uji F-statistik)

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara estimasi model common effect maupun estimasi model fixed effect. Hipotesis dalam pengujian ini yaitu:

Ho: memilih menggunakan model estimasi Common Effect.

H1: memilih menggunakan model estimasi Fixed Effect.

Dalam menentukan model yang tepat untuk digunakan maka dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Apabila nilai signifikansinya kurang dari 5% (signifikan) maka model estimasi yang akan digunakan adalah fixed effect, akan tetapi jika nilai signifikansinya lebih dari 5% (tidak signifikan) maka model yang digunakan adalah model common effect. Berikut adalah hasil pengujiannya:

Tabel 9.
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	300.943214	(10,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	238.360717	10	0.0000

Sumber: data diolah Eviews 12

Berdasarkan hasil pengujian antara common effect dan fixed effect didapatkan nilai probabilitas cross-section chi-square sebesar 0,0000. Nilai probabilitasnya lebih kecil dari alfa 5% ($0,0000 < 0,05$). Secara statistik menolak H_0 sehingga model yang tepat digunakan adalah model fixed effect.

2. Uji Hausman

Pengujian ini dilakukan untuk memilih model yang paling tepat untuk digunakan antara estimasi model fixed effect maupun estimasi model random effect. Apabila nilai probabilitasnya signifikan maka model yang digunakan adalah fixed effect. Sebaliknya apabila nilai probabilitasnya tidak signifikan maka model yang digunakan adalah random effect.

Tabel 10.
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	29.744453	4	0.0000

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12

Berdasarkan tabel uji Hausman diperoleh nilai distribusi chi-square dari perhitungan menggunakan Eviews 12 sebesar 29,74 dengan probabilitas 0.000 (lebih kecil dari 5%), sehingga model yang tepat digunakan adalah model estimasi fixed effect.

1. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketepatan yang baik dalam analisis yang dirunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi Adjusted R-squared.

Berdasarkan hasil estimasi model fixed effect didapatkan hasil Adjusted R-squared sebesar 0,9929. Variabel independen meliputi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal mampu menjelaskan variabel PDRB (pertumbuhan ekonomi) sebesar 99,29% sedangkan sisanya sebesar 0,71% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi atau tidak signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara menyeluruh.

Hipotesis:

Ho : $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ à variabel independen tidak berpengaruh

Ha : $\beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ à variabel independen berpengaruh

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai probabilitas (F- statistik) yaitu sebesar 543,62. Nilai Probabilitas (F-statistik) lebih kecil dari alfa 5% ($0,0000 < 0,05$) maka model signifikan 5% dan menolak Ho. Hal ini menunjukkan bahwa model layak dan variabel PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDRB (pertumbuhan ekonomi).

3. Uji Signifikansi Variabel Independen (Uji t)

Uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikan suatu variabel independen terhadap variabel dependen secara individu.

Dengan nilai R^2 sebesar 0,994772 memberikan nilai yang baik, nilai probability senilai 0,000000 memberi artian bahwa model tersebut highly significant dengan nilai Durbin-watson stat sebesar 2,03 yang berada pada kisaran ($1,5 < DW-Stat < 2,5$), fixed effect atau model efek tetap, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada intercept sehingga intercept dari setiap kabupaten/kota berbeda- beda juga dengan konstanta yang dimiliki berbeda- beda untuk itu dapat dilihat sebagai berikut :

$$PE = 39.092 - 0,004PAD - 0,471DAU + 0,164DAK + 0,0203BM$$

Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan tanpa dipengaruhi oleh variabel apapun, variabel lain didalam model konstan besarnya pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 39,09 milyar jika PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal konstanta tidak berubah

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Nilai Prob. Uji t Untuk semua variabel lebih dari 0,05; dengan demikian residual tidak berkorelasi dengan variabel bebas, atau dengan kata lain terjadinya homokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.136494	2.304839	-0.059221	0.9531
PAD	-0.011286	0.018340	-0.615343	0.5418
DAU	0.008920	0.074065	0.120441	0.9047
DAK	0.019225	0.026402	0.728143	0.4708
BM	-0.010966	0.012549	-0.873869	0.3874
R-squared	0.175773	Mean dependent var		0.029935
Adjusted R-squared	-0.112706	S.D. dependent var		0.019816
F-statistic	0.609310	Durbin-Watson stat		2.656812
Prob(F-statistic)	0.841175			

1. Autokorelasi

Berdasarkan uji durbin watson, dari tabel diatas diperoleh nilai durbin-watson sebesar 2.034810. Kemudian dari tabel durbin-watson, dengan menggunakan jumlah data sebanyak 55 dan jumlah variabel bebas sebanyak 4 variabel, maka diperoleh batas bawah (DL) sebesar 1,4 serta batas atas sebesar (DU) sebesar 1,7. Berdasarkan kriteria uji durbin-watson, maka nilai DW= 2.034810 berada pada rentang DU (1,7) dengan 4-DU (2,3), maka diperoleh kesimpulan tidak ada wautokorelasi.

2. Multikolinieritas

	PAD	DAU	DAK	BM
PAD	1.000000	0.680024	0.595057	0.373789
DAU	0.680024	1.000000	0.711984	0.155201
DAK	0.595057	0.711984	1.000000	0.359217

BM	0.373789	0.155201	0.359217	1.000000
----	----------	----------	----------	----------

korelasi antar variabel kurang dari 0,85, dengan demikian menyatakan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas.

3. Hasil Uji Hipotesis

Hasil uji t diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Prob.>0,05; atau dengan kata lain variabel PAD, DAU, DAK, dan BM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam hal ini diukur dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Berdasarkan Uji F diatas, diketahui bahwa Prob(F-statistic) bernilai kurang dari 0,05; dengan kata lain bahwa model regresi signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan BM secara bersama-sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB).

Berdasarkan nilai R-squared sebesar 0,994772; berarti bahwa variabel PAD DAU DAK dan BM dapat menjelaskan perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 99,47 persen. Sedangkan sisanya sebesar 0,53 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model.

1) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Variabel pendapatan asli daerah (PAD) memiliki t hitung sebesar 0,108 dengan $\alpha = 5\%$ Berdasarkan nilai Prob. diperoleh nilai sebesar 0,914. Jadi, nilai Prob. > 0,05 sehingga menerima H_0 , artinya variabel PAD tidak berpengaruh terhadap PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silviani,.A., (2018) yang meneliti tentang pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan ekonomi. dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Luwu Utara bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai Prob. (P-value) sebesar 0,0029, jika dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ maka nilai Prob. < 0,05. Sehingga menolak H_0 . Artinya variabel dana alokasi umum (DAU) berpengaruh signifikan secara statistic terhadap PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien inflasi bernilai -0,47. Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara DAU dengan PDRB yaitu hubungan negative, artinya setiap kenaikan 1 milyar DAU maka akan menurunkan PDRB sebesar 0,47 milyar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ufia (2017) yang meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. Mengatakan bahwa secara statistic Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai Prob. (P-value) sebesar 0,0036, jika dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ maka nilai Prob. < 0,05. Sehingga menolak H_0 . Artinya variabel dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan secara statistic terhadap PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien inflasi bernilai 0,16. Angka tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara DAK dengan PDRB yaitu hubungan positif, artinya setiap kenaikan 1 milyar DAK akan meningkatkan PDRB sebesar 0,16 milyar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrun (2016) yang meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Laju

Pertumbuhan Ekonomi. Mengatakan bahwa secara statistic Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

4) Pengaruh Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Variabel belanja barang modal (BM) memiliki nilai Prob. (P-value) sebesar 0,42, jika dibandingkan dengan $\alpha = 5\%$ maka nilai Prob. $> 0,05$. Sehingga menerima H_0 . Artinya variabel belanja barang modal (BM) tidak berpengaruh signifikan secara statistic terhadap PDRB atas dasar harga konstan (ADHK).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasrun (2016) yang meneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Mengatakan bahwa secara statistik belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi PDRB).

C. Implikasi Kebijakan

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan belanja Modal adalah komponen yang secara bersama- sama mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (PDRB).

1. Pengaruh PAD terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imelda.,T (2019) yang mengatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Tidak berpengaruhnya PAD terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ kota Provinsi Jambi dikarenakan realisasi PAD di setiap kabupaten/ kota di provinsi jambi masih sangat rendah dan masih sangat tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu PAD yang ada tidak cukup memberikan kontribusi dalam laju pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap laju pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Henita.,A.(2015) mengatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan. Berpengaruhnya DAU terhadap laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer ke daerah yang ditujukan untuk pemerataan keuangandan layanan public antar daerah. selain itu juga dana alokasi umum ini sepenuhnya pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan program daerahnya sesuai dengan prioritas masing- masing. Jelas bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah. sehingga diharapkan laju pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat.

3. Pengaruh DAK terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamilla.,D.,(2020) mengatakan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi secara simultan. Berpengaruhnya DAK terhadap laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan nilai DAK yang diterima pemerintah daerah digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat khusus yang merupakan urusan daerah. kegiatan khusus yang dimaksud sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh APBN misalnya untuk layanan umum, pendidikan dan lain- lain. DAK dikelola dengan baik tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. Pengaruh Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/ kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian ini juga sama yang dilakukan oleh Kumal.,S.,(2019) mengatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Tidak berpengaruhnya belanja modal di kabupaten/kota di provinsi jambi terhadap laju pertumbuhan ekonomi dikarenakan realisasi Belanja Modal masih rendah selain itu juga sumber pembiayaan dari belanja modal itu sendiri sebagian besar dari PAD.

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa variabel PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jambi
2. Dana alokasi umum (DAK) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan secara statistik terhadap Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jambi. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal (BM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jambi

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, A., Iskandar, R., & Irwansyah. (2016). Influence of Government Investment and Private Investment and Labor Against Domestic Product Gross Regional and Own Local Revenue Samarinda. *Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 163–178. <http://journal.feb.unmul.ac.id>
- Badrudin, R., & Kuncorojati, I. (2017). the Effect of District Own-Source Revenue and Balance Funds on Public Welfare By Capital Expenditure and Economic Growth As an Intervening Variable in Special District of Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 19(1), 54–59. <https://doi.org/10.9744/jmk.19.1.54-59>
- Gunawan, I., & Suebah, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Serang. *Journal Management Retail*, 02(1), 54–77.
- Habibah, S., Kuncoro, H., & Dianta, K. (2017). Effect of Fiscal Decentralization on Economic Growth of Regency/City in East Java 2010-2014. *Econosains Jurnal Online Ekonomi Dan Pendidikan*, 15(2), 202–210. <https://doi.org/10.21009/econosains.0152.03>
- Hakim, M., Sarma, M., & Harianto, H. (2018). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1), 15–24. https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i1.22701
- Herrmann, H., & Bucksch, H. (2014). Self-Supporting. *Dictionary Geotechnical Engineering/WörterbuchGeoTechnik*, 1197–1197. https://doi.org/10.1007/978-3-642-41714-6_191957
- Henita, A., (2015). Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *AKRUAL: Jurnal Ekonomi*, 6 (1), 1. <https://doi.org/jaj.v7n1.p1-12>
- Hildegunda, W. (2010). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin di Wilayah Pemekaran Tingkat Kabupaten (Studi Kasus Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Sebelum Dan Sesudah Pemekaran di Kabupaten Nagekeo Propinsi NTT Tahun 2005-2009). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2011). Rama_60201_01021181419234_0010076003_0020105704_02. 7–35.
- Indonesia, P. R. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>

- Indonesia, R. (2015). UU Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 9, 1–14. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>
- Jamila., D., (2020). Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jurnal STEI, 7(1), 1. <https://doi.org/10.2340/jaj.v7n1.p1-17>
- Imelda., T., (2019). Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 1. <https://doi.org/10./jaj.v7n1.p1-10>
- Irmanelly, I., Noprihartini, N., Herlin, F., & Hierdawaty, T. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jambi. *Journal Development*, 11(1), 38–44. <https://doi.org/10.53978/jd.v11i1.275>
- Irwan. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan). *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3.
- Jemmy J. Pietersz, Benjamin Carel Picauly, D. (2021). Perpajakan Teori Dan Praktik. In Widina Bhakti Persada Bandung (Grup CV. Widina Media Utama).
- Kumala, D. N. C. (2018). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal (studi kasus pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 3–12.
- Kumal., S., (2019). Pengaruh DAU dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Jurnal STEI, 5(1), 1. <https://doi.org/10.2340/jaj.v7n1.p1-17>
- Megasari. (2020). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Utara. *DINAMIS- Journal of Islamic Management And Bussines*, 1(3), 10–16.
- Mulyani, E. S., Sudarman, S., & Astuti, R. F. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020. *Educational Studies: Conference Series*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.30872/escs.v1i2.894>
- Nasrun., (2016). Pengaruh DAK Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jurnal STEI, 7(1), 1. <https://doi.org/10.2340/jaj.v7n1.p1-17>
- Palguno, M. D., Valeriani, D., & Suhartono, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2009-2018. *Sorot*, 15(2), 105. <https://doi.org/10.31258/sorot.15.2.105-116>
- Pradana, A. C. T., & Mun'im, A. (2022). The Effect of Local Revenue and Balancing Funds on the Economy of Bali Province in 2012-2019. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 439–451. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.439-451>
- Priambodo, A. (2014). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(3), 427–435. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Ridwan, D., & Anis, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 4(1), 47. <https://doi.org/10.24036/jkep.v4i1.13358>
- Rori, C. F., Luntungan, A. Y., Niode, A. O., Pembangunan, J. E., & Ekonomi, F. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 243–254.
- Saputera, A. G. E., & Pandoyo. (2020). Pengaruh Dau, Pad, Dak Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekbank*, 3(2), 17–28. daerah-terhadap-pert-4a386eeb.pdf
- Siswiyanti, P. (2017). Pengaruh Pad, Dau, Dak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>

- Silvia, A., (2018). Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7(3), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-12>
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Rustam, R., & Syofyan, S. (2020). Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java Province. *Business and Accounting Research (IJE BAR) Peer Reviewed-International Journal*, 4(4), 1053–1059. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJE BAR>
- Ufia., (2017). Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi *Jurnal STEI*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v7n1.p1-17>
- Utomo, H. (2020). Pengaruh Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Medan. Skripsi Thesis, Universitas Quality.*, 4, 1–23.
- Wahyuni, A. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. *Jurnal STEI, XX(Xx)*, 1–22.
- Widyasari, K. (2022). The Effect of Pad, Capital Expenditure, Silpa and Budget Changes on Regional Economic Growth During the Pandemic in *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 5, 317–326. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v5i2.619>
- Wiksuana, I. G. B., & Kusumawati, L. (2017). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Kabupaten Wilayah. *Analisis Pendapatan Asli Daerah, DAU, DAK, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, 7(5), 2592–2620. <https://media.neliti.com/media/publications/254231-pengaruh-pendapatan-daerah-terhadap-pert-4a386eeb.pdf>
- Yuliandari, R., Chadir, T., & Mahmudi, H. (2017). The Analysis of Effectivity and Efficiency of Tax Collection from Hotels and Restaurants in Order to Increase The Original Regional Income (PAD) in Mataram. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 9(2), 257–265. <https://doi.org/10.17977/um002v9i22017p257>.